



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO SUMITRO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 516835

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.472.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/90 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 301 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 892.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **281.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA 14DAL115C / MIO SOUL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, SUZUKI FH 125 M / SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 14DAL115C / MIO SOUL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. MOTOR, YAMAHA BG7 /SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



6. MOBIL, HONDA CR-V RM3 2WD 2,4 AT CKD Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	167.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	156.760.722
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.078.010.722
III. HUTANG	Rp.	49.726.370
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.028.284.352

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.